



Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Strategi Pembangunan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Policy Implementation of Regional Regulation 2019 Regarding Tourism Development Strategy at The Labuhanbatu Selatan Tourism Service

Fengky Aryo Aritonang, Budi Hartono, & Novita Wulandari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah merupakan 2 (dua) dinas yang berbeda, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata. Pada tahun 2002, kedua dinas ini bergabung menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang diharapkan agar lebih mengoptimalkan serta bersinergi dalam melaksanakan pengembangan di bidang pemuda olahraga serta objek wisata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pelaksana kebijakan peraturan daerah No 6 Tahun 2019 Bab VI Tentang Strategi Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Simalungun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi oleh Edward III, penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Kata Kunci: Implementasi; Dinas Pariwisata; Labuhanbatu Selatan

Abstract

The Department of Youth, Sports and Tourism of South Labuhanbatu Regency is 2 (two) different offices, namely the Office of Youth and Sports and the Office of Tourism. In 2002, these two agencies merged to become the Youth, Sports and Tourism Office which is expected to further optimize and synergize in carrying out development in the field of youth sports and tourism objects in South Labuhanbatu Regency. In this case, the Tourism and Culture Office of South Labuhanbatu Regency as the implementer of the regional regulation policy No. 6 of 2019 Chapter VI Concerning Tourism Development Strategies in Simalungun Regency. The theory used in this research is Implementation theory by Edward III, this research uses a qualitative type methodology which using interview techniques, observation, and also documentation. As reinforcement, this study also consisted of key informants, main informants and additional informants using data analysis techniques by Miles and Huberman namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

Keywords: Implementation; Tourism Office; South Labuhanbatu Regency

How to Cite: Aritonang, F. A. Hartono, B. & Wulandari, N. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Strategi Pembangunan Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(2) 2023: 85-91,

*E-mail: budihartono@staff.uma.ac.id

ISSN [2828-6537](https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.2145) (Online)



PENDAHULUAN

Kurangnya pengembangan dalam sektor pariwisata dapat merusak potensi ekonomi dan peluang pertumbuhan suatu daerah. Salah satu indikator kurangnya pengembangan adalah keterbatasan lahan dan kurangnya infrastruktur wisata yang memadai. Keterbatasan lahan dapat membatasi kapasitas suatu destinasi wisata untuk menarik jumlah pengunjung yang lebih besar. Selain itu, kurangnya sarana seperti pondok-pondok atau akomodasi juga dapat menghalangi wisatawan untuk menghabiskan waktu lebih lama di daerah tersebut. Pengembangan infrastruktur wisata yang memadai adalah langkah penting untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan (Suharyanto et al., 2019, 2022).

Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga merupakan kendala serius dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini, kurangnya kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengelola objek Wisata Sampuran Pandayangan adalah contoh konkretnya. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengelola destinasi wisata sangat penting untuk merawat dan menjaga destinasi tersebut agar tetap menarik bagi pengunjung. Kerjasama ini juga dapat mencakup aspek keuangan, di mana pengelola objek wisata bisa mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki destinasi (Lubis et al., 2020; Suharyanto et al., 2020).

Oleh karena itu, untuk mengatasi kurangnya pengembangan dalam sektor pariwisata, penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua pihak terkait. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan infrastruktur wisata, memperluas lahan yang tersedia, serta merawat dan menjaga destinasi wisata dengan baik. Dengan demikian, daerah tersebut dapat memaksimalkan potensi pariwisatanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan ekonomi local (Publik et al., 2020; Sugiyanto et al., 2020; Sumarto, 2021).

Pengembangan destinasi wisata tidak hanya tergantung pada aspek infrastruktur dan koordinasi antara instansi terkait, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya yang unik dari daerah tersebut. Aspek kebudayaan daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengidentifikasi karakteristik destinasi wisata dan menciptakan pengalaman yang unik bagi pengunjung (Nugraha, 2022; Simarmata & Saragih, 2020, 2020; Susanty, 2020). Misalnya, kuliner adalah salah satu aspek yang mencerminkan kekayaan budaya suatu daerah. Di banyak destinasi wisata, makanan lokal dapat menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang mencari pengalaman kuliner yang autentik. Oleh karena itu, dalam pengembangan destinasi wisata, penting untuk mempertahankan dan mempromosikan kebudayaan lokal, termasuk kuliner, sebagai bagian integral dari daya tarik wisata (Azijah et al., 2022; Nasution et al., 2023).

Namun, masalah yang muncul dalam pengembangan destinasi wisata, seperti yang Anda sebutkan, memerlukan tindakan yang tepat dari pihak berwenang. Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam teori tersebut, empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2011).

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Dinas Pariwisata dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan destinasi wisata, memastikan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan untuk pengembangan, membangun disposisi positif dari semua pihak yang terlibat, dan menyesuaikan struktur birokrasi agar lebih efisien dalam mengelola dan mempromosikan destinasi wisata. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berdasarkan teori yang tepat, pengembangan destinasi wisata, seperti Destinasi Wisata Sampuran Pandayangan, memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dalam menarik pengunjung dan memberikan manfaat yang signifikan bagi daerah tersebut.

Perkembangan destinasi pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat signifikan, tidak hanya bagi sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga bagi ekonomi daerah dan masyarakat setempat. Untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemerintah daerah harus merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang efektif dan terencana dengan baik. Kebijakan ini harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan pariwisata daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, promosi, dan peraturan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata (Manajemen et al., 2023; Susilo et al., 2022).

Salah satu dampak positif yang dapat dihasilkan dari perkembangan destinasi pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan memperkaya daya tarik destinasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengikuti tren pasar yang berkembang, daerah dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Wisatawan umumnya menghabiskan uang di daerah yang mereka kunjungi, membeli produk lokal, menggunakan layanan akomodasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis di sekitar destinasi tersebut.

Selain manfaat ekonomi langsung, perkembangan destinasi pariwisata juga dapat berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang terkait dengan sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola destinasi pariwisata secara efisien dan memastikan bahwa pengunjung dikenai pajak dengan adil, PAD dapat ditingkatkan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah tersebut (Haeba et al., 2021).

Dengan demikian, pengembangan destinasi pariwisata bukan hanya tentang menciptakan tempat wisata yang menarik, tetapi juga tentang perencanaan kebijakan yang matang dan implementasi yang efektif untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif yang melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sugiyono, 2019). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan sebagai sumber data yang memberikan wawasan yang beragam terkait dengan implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang strategi pengembangan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan.

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktiknya. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan dengan menggunakan empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat dilihat dari penilaian terhadap empat indikator yang telah disebutkan, di mana terdapat hambatan dan kendala dalam proses implementasi. Sebagai contoh, kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, keterbatasan sumber daya yang tersedia, disposisi yang belum sepenuhnya mendukung, dan struktur birokrasi yang mungkin perlu diperbaiki.

Penelitian ini memiliki implikasi yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pariwisata di Labuhanbatu Selatan. Temuan-temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan dan merancang strategi perbaikan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Labuhanbatu Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana strategi pembangunan kepariwisataan adalah sebuah panduan yang menguraikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan sektor pariwisata suatu daerah. Strategi pembangunan ini melibatkan empat aspek utama yang saling terkait, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan. Ketika suatu daerah, seperti Labuhanbatu Selatan, merumuskan rencana strategi pembangunan kepariwisataan, penting untuk memperhatikan setiap aspek ini dengan cermat.

Salah satu aspek kunci dalam implementasi strategi kepariwisataan adalah komunikasi yang efektif. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan, memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Ini termasuk berkomunikasi dengan pengelola objek wisata untuk memastikan bahwa infrastruktur, sarana, dan prasarana



yang diperlukan oleh pengunjung tersedia dan memadai. Komunikasi ini penting untuk mendukung pengembangan objek wisata yang menarik bagi wisatawan.

Selain komunikasi dengan pengelola objek wisata, pemerintah daerah juga perlu berkomunikasi dengan pihak swasta. Ini mencakup berbagai pihak seperti hotel, restoran, operator tur, dan bisnis terkait pariwisata lainnya. Komunikasi yang efektif dengan sektor swasta dapat menciptakan peluang kemitraan yang saling menguntungkan, yang dapat meningkatkan daya tarik dan pelayanan bagi wisatawan.

Dampak dari komunikasi yang baik dalam implementasi strategi kepariwisataan adalah peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, suatu daerah dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pertumbuhan sektor pariwisata. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif adalah salah satu elemen kunci dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan strategi pembangunan kepariwisataan.

Komunikasi merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata. Dalam hal ini, komunikasi dengan pihak pengelola objek wisata dan pihak swasta memiliki peran penting untuk mencapai kesepakatan bersama dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola objek wisata dan pihak swasta, pemerintah daerah di Labuhanbatu Selatan tidak mengalami hambatan awal. Ini adalah hal yang positif karena memudahkan proses komunikasi awal yang diperlukan untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing pihak.

Namun, setelah terlaksananya komunikasi dan musyawarah, pemerintah daerah menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan yang muncul adalah ketidaktersediaan masyarakat untuk memberikan atau menghibahkan sebagian tanah mereka untuk meningkatkan objek wisata. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi atau ketakutan akan kehilangan lahan. Pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras untuk menjalin dialog dan merancang insentif yang dapat meyakinkan masyarakat tentang manfaat dari kontribusi mereka dalam pengembangan objek wisata.

Selain itu, hambatan lain adalah ketidaklanjutan tindakan dari masyarakat yang awalnya bersedia memberikan atau menghibahkan tanah mereka. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya tentang kesepakatan awal, tetapi juga tentang memastikan adanya tindak lanjut yang efektif. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah-langkah dan insentif tambahan yang mungkin diperlukan untuk memotivasi masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap fleksibel, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan mencari solusi kolaboratif yang memungkinkan semua pihak terlibat merasa terlibat dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kesuksesan pelaksanaan kebijakan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan bijaksana dan efektif.

Dalam pelaksanaan kebijakan di Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menetapkan anggota yang bertanggung jawab dalam menjaga, merawat, dan mengelola objek wisata. Langkah ini melibatkan pengangkatan dan penetapan pegawai dengan status Pegawai Honor, yang kemudian diberikan Surat Keputusan (SK) yang mengamanatkan tugas mereka terkait objek wisata. Penting untuk dicatat bahwa dalam penetapan Pegawai Honor ini, Pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan yang signifikan. Bahkan, banyak masyarakat yang secara sukarela mengajukan diri untuk diangkat sebagai Pegawai Honor dalam rangka mendukung pengembangan objek wisata tersebut.

Meskipun proses penetapan Pegawai Honor berjalan dengan baik, ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu di antaranya adalah kurangnya persyaratan pendidikan yang sesuai dengan posisi yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pendidikan yang sesuai dapat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anggota yang ditugaskan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diemban. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan persyaratan pendidikan yang relevan dalam penetapan anggota yang bertanggung jawab atas objek wisata.

Selain itu, Pemerintah Daerah telah melakukan analisis situasi yang komprehensif sebelum dan selama pelaksanaan kebijakan terkait objek wisata. Analisis ini mencakup penetapan

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan analisis situasi di lokasi objek wisata yang akan dikelola dan dikembangkan. Dalam analisis situasi ini, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memahami potensi dan kendala yang mungkin muncul. Dengan terjun langsung ke lapangan, mereka memeriksa apakah objek wisata layak dikembangkan dan potensi apa yang bisa ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Meskipun hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak melaporkan adanya kendala atau permasalahan yang signifikan dalam analisis situasi, mereka telah menegaskan bahwa jika kendala atau permasalahan muncul di masa depan, Pemerintah Daerah akan memainkan peran kunci dalam menghadapinya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melanjutkan dan memastikan keberlanjutan pengembangan objek wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses perencanaan kebijakan ini memberikan gambaran bahwa pihak berwenang telah melakukan analisis yang baik untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata.

Proses peningkatan sarana dan fasilitas umum untuk pengembangan objek wisata adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata di Labuhanbatu Selatan. Pemerintah Daerah memiliki pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan objek wisata dengan menunggu informasi yang diberikan oleh pihak objek wisata itu sendiri. Hal ini menunjukkan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pengelola objek wisata dalam rangka memahami apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas objek wisata.

Selain itu, dalam pemenuhan sarana dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah juga aktif mencari celah dan peluang untuk mengidentifikasi apa yang belum ada di objek wisata. Tindakan ini menunjukkan inisiatif untuk secara proaktif berkontribusi pada peningkatan infrastruktur objek wisata. Dengan mencari kekurangan dan mencoba untuk mengisi celah ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan daya tarik objek wisata.

Pemerintah Daerah juga memiliki rencana untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dengan membuka warung atau tempat makan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar objek wisata. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mereka. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana kebijakan pariwisata tidak hanya berdampak pada objek wisata itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat lokal.

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berperan aktif dengan cara memilih anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang akan mereka jalankan. Selain itu, pelatihan dan pendidikan terus-menerus diberikan kepada anggota-anggota tersebut. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pariwisata.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan sarana, prasarana, fasilitas umum, dan sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang positif untuk mendukung pengembangan objek wisata. Dengan pendekatan yang responsif, proaktif, dan berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal, Pemerintah Daerah dapat berperan kunci dalam meningkatkan daya tarik objek wisata dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Labuhanbatu Selatan, ditemukan sejumlah masalah yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah ketiadaan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang mencakup pengembangan potensi sumber daya budaya, sejarah, dan alam yang berbasis pada kearifan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada landasan yang jelas untuk pengembangan destinasi wisata di daerah tersebut.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa strategi pembangunan dalam pemasaran pariwisata berbasis sumber daya manusia, baik dalam kalangan aparatur pemerintah maupun



masyarakat, masih belum terlihat dengan jelas. Kurangnya strategi ini berpotensi berdampak pada indeks pariwisata daerah, yang mencakup pelayanan jasa dan barang yang diperlukan oleh wisatawan. Selain itu, komunikasi mengenai sumber daya yang tersedia di daerah ini juga masih belum optimal. Informasi mengenai kepariwisatahan daerah belum tersedia secara lengkap dan terintegrasi, baik melalui website maupun aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama wisatawan.

Dalam konteks teori yang diajukan oleh George C. Edward III, yang mengidentifikasi empat variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan perubahan dalam hal komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, disposisi yang lebih proaktif, serta perbaikan dalam struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan pariwisata di Labuhanbatu Selatan dapat mencapai tingkat optimal yang sesuai dengan tujuan pengembangan pariwisata daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azidah, F., Amalia, A., Nurfajar, M., Sitanggang, A. S., & Lukita, C. (2022). Peran Pemerintah dalam Pelestarian Kampung Adat Cireunde. *Perspektif*, 11(3), 1173–1180. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7240>
- Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. Bin, Suharyanto, A., & Cahyani, H. (2021). The Influence of the Level of Public Awareness and Public Understanding of the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets through the Property Tax (PBB) Collection Process. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3756–3763.
- Lubis, F. R. A., Suharyanto, A., Effendy, R., Meidasari, V. E., & Shahnaz, L. (2020). Role of facebook advertising in promoting tourism in Asia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 1286–1296. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200228>
- Manajemen, P. S., Ekonomika, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Pengembangan Model Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata Nonongan, Kabupaten Toraja Utara Development of a Sustainable Tourism Model Based on Local Wisdom in Nonongan Tourism Village, North Toraja Regency*. 12(3), 942–951. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9489>
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Publik, I. A., Ilmu, F., & Politik, I. (2020). Strategi City Branding Kota Surabaya Sparkling Surabaya dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Increasing Tourist Visits. *PERSPEKTIF*, 9(2), 322–328.
- Simarmata, H. M. P., & Saragih, R. S. (2020). Destination Image as a Strategy to Increase the Number of Tourists for Lake Toba “Monaco of Asia” in Samosir Regency. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 533–537.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyanto, S., Yunanto, M. K., & Yulianto, D. (2020). Inovasi Pengembangan Wisata Kampung Nelayan di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Endeuraan Tetandara, Rukun Lima, dan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. *Perspektif*, 9(1), 27–37. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2996>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharyanto, A., Barus, R. K. I., & Batubara, B. M. (2020). Photography and Tourism Potential of Denai Kuala Village. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 2(1), 100–108.
- Suharyanto, A., Febryani, A., Wiflihani, W., & Batubara, B. (2019). Village Government Policy on Tourism Management in Situngkir Village. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (Formerly ICCSSIS), ICCSSIS 2019, 24-25 October 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Suharyanto, A., Sihombing, M., Ridho, H., & Kusmanto, H. (2022). Public Service Management for Art Activists at the North Sumatra Cultural Park. *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial*.
- Sumarto, R. H. (2021). *Tata kelola pariwisata di kampung-kampung wisata kota yogyakarta melalui perspektif hexa helix*. Universitas Brawijaya.

- Susanty, S. (2020). Dimensi Global Pariwisata : Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Kesetaraan Gender dalam Industri Pariwisata. In *Jurnal media bina ilmiah* (Vol. 14, Issue 7, pp. 2919–2926).
- Susilo, S. D., Simanjorang, E. F. S., & Siregar, N. A. (2022). Upaya Pengembangan Pantai Alam Geger sebagai Objek Wisata dalam Meningkatkan Tourism Visit dan Economic Sector bagi Masyarakat Desa Kampung dalam Kabupaten Labuhan Batu. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 134–147. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i1.7604>

